



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 25 April 2020

Halaman: 7

Pemeriksaan Perbatasan Masih Bersifat Persuasif

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY belum melakukan ketegasan dalam penanganan Covid-19. Khususnya mengenai respons pelarangan mudik yang mulai diberlakukan kemarin. Semula mobil dari luar daerah, khususnya yang melintas dari zona merah benar-benar tidak diperkenankan untuk masuk ke DIY.

Saat ini, ketiga perbatasan yakni di Tempel, Prambanan, dan Congot Kulon Progo telah dijaga ketat. Namun, pantauan di lapangan, banyak pemudik yang dari luar daerah tidak mematuhi anjuran physical distancing. Mereka hanya mendapat imbauan dan teguran saja, pada Jumat (24/4).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yusewanta mengatakan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 5/SE/IV/2020 tentang Antisipasi Perkembangan Eskalasi Penyebaran Covid-19.

SE tersebut ditujukan kepada bupati/wali kota se-DIY dan Kepala Dinas Perhubungan DIY guna menangani pembatasan dan deteksi pendatang yang masuk wilayah DIY. "Penanganan pemudik ini perlu melibatkan dari berbagai pihak. Di antaranya dishub, dinkes, dan juga beberapa instansi lain."

Biwara mengatakan, saat ini pemeriksaan hanya bersifat persuasif. Belum ada sanksi, hanya saja, lanjut dia para pemudik wajib jalani tes kesehatan di posko yang telah disediakan. Namun, pantauan *Tribun Jogja* pada Jumat pagi di perbatasan Tempel, pemudik hanya diminta menunjukkan KTP dan tanpa dilakukan pengukuran suhu. Posko yang disediakan untuk pemeriksaan pun masih belum digunakan.

"Memang butuh kerja sama dengan lintas sektoral. Namun kami tekankan, kalau pemudik merasa sesak, batuk, dan gejala lain, kami akan merujuk ke puskesmas dan rumah sakit terdekat," tegasnya.

Selain di perbatasan, Biwara mengatakan, beberapa stasiun dan terminal dipastikan sudah tidak beroperasi lagi. Aktivitas terminal bus di wilayah DIY pun dibatasi. Ada sua jadwal yang dite-

rapkan di terminal bus, yaitu pagi pukul 06.00 WIB sampai dengan petang pukul 18.00 WIB, dan malam pukul 00.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB.

Penjagaan di terminal juga diperkuat dengan personel gabungan yang lengkap. Selain itu, untuk bandara dan stasiun telah resmi tidak beroperasi secara komersil hingga 31 Mei 2020 mendatang. Terkait penanganan karantina, untuk saat ini pemudik yang masuk ke DIY tidak dilakukan rapid test. "Rapid test hanya untuk tenaga medis dan keluarga pasien yang kontak langsung dengan PDP (pasien dalam pengawasan)," sambung Biwara.

Bantuan sosial
Proses jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak, yang semula disyaratkan Pemda DIY turun sebelum Ramadan, sampai saat ini masih belum terlihat. Dalam kesempatan itu, Biwara menyebut bantuan sosial berupa jaminan hidup (jadup) masih dalam proses validasi data.

"Karena data itu terus bergerak. Dari disnaker berapa, dinas kebudayaan berapa, dinsos, disperindag dan UMKM berapa, termasuk dinas pariwisata semua sedang divalidkan," tegasnya.

Biwara menjanjikan Senin baru akan masuk tahap pemaparan dengan Wakil Gubernur DIY. Sebelumnya, validasi sudah dilakukan oleh lima kepala daerah di DIY. Data per 17 April lalu, Pemda DIY mencatat ada 125.000 Kepala Keluarga yang sudah masuk. Namun, sampai saat ini Biwara masih belum mengetahui jumlah secara pasti penerima bantuan tersebut. "Makanya tunggu Senin besok saat pemaparan dengan Pak Wagub," singkatnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukaryadi menambahkan, proses penyaluran jadup sudah bukan menjadi kewenangan pihaknya. "Sudah urusannya tim Gugus Tugas. Kami hanya sebagai bank data saja. Dan sesuai DTKS untuk penerimanya," terang dia.

Pemda DIY belum memikirkan bagaimana nasib warga luar Kota yang masih menetap di DIY. Karena, lanjut Untung, penerima bantuan hanya menyesuaikan NIK dan juga Nomor KK yang berlaku. "Selain itu tidak bisa mengakses bantuan. Itu sudah prosedur," pungkasnya. (hda)

Penanganan pemudik ini perlu melibatkan dari berbagai pihak. Di antaranya dishub, dinkes, dan juga beberapa instansi lain.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005